

ABSTRAK

Pengaturan secara tertulis mengenai kedudukan Paten yang dihasilkan dalam skema pengusahaan hulu Migas merupakan suatu keharusan guna menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum. Skema kontrak kerja sama *production sharing contract* yang dijalankan menghendaki Kontraktor untuk terus berinovasi mengembangkan teknologi yang erat kaitannya dengan Paten. Maka dari itu, perlu ditelaah lebih lanjut perihal pengaturan invensi teknologi hulu Migas dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk mengenai kepemilikan beserta aspek ekonomis yang melekat pada invensi tersebut.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif berupa studi kepustakaan yang didukung dengan hasil wawancara untuk kemudian data diolah dan dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan masih ditemukannya pengaturan semu mengenai invensi teknologi yang dihasilkan selama berjalannya kontrak kerja sama hulu Migas di Indonesia baik dalam kerangka regulasi di sektor Migas maupun Paten. Disamping itu, terdapat beberapa ketentuan penghubung terkait kepemilikan, seperti konsep penguasaan negara, kedudukan Data dan peluasan makna atas barang hulu migas, kedudukan Kontraktor, dan skema *cost recovery* yang dijalankan. Selain itu, penguasaan atas Paten, dapat menghasilkan penerimaan lebih bagi negara dalam bentuk PNBPN berupa royalti dan juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan pembiayaan.

Kata Kunci: *Production sharing contract*, Penerimaan negara, Barang Milik Negara.

ABSTRACT

A written regulation concerning the position of patents generated under the upstream oil and gas (Migas) operation scheme is a necessity to ensure legal protection and certainty. The production sharing contract scheme, as implemented, requires Contractors to continuously innovate and develop technologies that are closely related to patents. Therefore, it is necessary to further examine the regulation of upstream Migas technological inventions within the framework of Indonesian laws and regulations, including aspects of ownership and the economic rights inherent in such inventions.

This research employs a normative juridical method, specifically a literature study supported by interview results, which data collected was then processed and analyzed using descriptive analytical techniques.

The findings indicate that ambiguous or incomplete regulations persist regarding technological inventions generated during the term of upstream Migas production sharing contracts in Indonesia, both within the Migas sector regulations and patent laws. Nevertheless, there are several connecting provisions concerning ownership, such as the concept of state control, the status of data, the expanded definition of upstream Migas goods, the position of the Contractor, and the applicable cost recovery scheme. Furthermore, control over patents would generate additional

state revenue in the form of Non-Tax State Revenue (PNBP) from royalties, and such patents may also serve as objects for financing collateral.

Keywords: *Production sharing contract, State revenue, State-owned goods.*